TRANSFORMASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Ade Mahmud
Universitas Islam Bandung
Email : ademahmud100@yahoo.com

Masuk: Maret 2018	Penerimaan: April 2018	Publikasi: Juni 2018
-------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Kondisi hukum pidana nasional sebagai warisan dari Kolonial Belanda dipandang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga usaha pembaharuan hukum pidana (KUHP) terus disuarakan melalui re-formulasi kebijakan hukum pidana. Hasil penelitian (1) Pembaharuan hukum pidana nasional berlandaskan pada misi (a) Dekolonisasi melalui “rekodifikasi” (b) Demokratisasi hukum pidana (c) Konsolidasi hukum pidana untuk menghindari benturan norma (*antinomy normen*) (d) Adaptasi dan harmonisasi hukum pidana sesuai perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. (2) Transformasi ide/paradigma/nilai Pancasila dalam RKUHP dapat ditempuh melalui strategi penal reform yang mensyaratkan: (a) Identifikasi problem berupa pengkajian norma lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat (b) Melakukan re-evaluasi ide dasar/nilai yang ada di belakang pasal lama (ide/paradigma individualisme/liberalisme) dan mengubah/menggantinya dengan menerapkan ide/paradigma/nilai Pancasila dalam rancangan rumusan pasal yang baru. (c) Melakukan mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam rumusan pasal baru dan mencabut rumusan ide/paradigma nilai yang terdapat dalam pasal lama.

Kata Kunci: Transformasi, Pancasila, Pembaharuan Hukum Pidana.

ABSTRACT

The condition of the national criminal law as a legacy of the Dutch Colonial is deemed inconsistent with Pancasila values so that the effort to reform the criminal law (KUHP) continues to be voiced through the re-formulation of criminal law policy. The results (1) Renewal of national criminal law based on mission (a) Decolonization through "recodification" (b) Democratization of criminal law (c) Consolidation of criminal law to avoid conflict of norms (antinomy normen) (d) Adaptation and harmonization of criminal law with the development of criminal law science. (2) The transformation of idea / paradigm / value of Pancasila in the RKUHP can be pursued through a penal reform strategy that requires (a) Identification of problems in the form of old norms that are considered inconsistent with the social condition of the community. (b) the basis / value that lies behind the old chapter (ide / paradigm of individualism / liberalism) and change / replace it by applying the idea / paradigm / value of Pancasila in the new draft formulation of the article. (c) Transform the values of Pancasila into the formulation of

a new chapter and revoke the formula / value paradigm of value contained in the old chapter.

Keywords: *Transformation, Pancasila, Criminal Law Update.*

I. PENDAHULUAN

Kondisi perubahan sosial yang bergulir saat ini membawa sikap kritis masyarakat terhadap kondisi hukum nasional baik dari sisi substansial maupun penegakan hukumnya.¹ Masyarakat menuntut adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum.² Karena tujuan utama negara hukum adalah menyelenggarakan kepastian, keadilan dan ketertiban.³ Keterbatasan hukum dalam menjangkau problematika di masyarakat

memunculkan sejumlah gejolak sosial karena hukum senantiasa tertinggal di belakang obyek yang diaturnya. Dengan demikian akan selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dan kenyataan sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang mencolok.⁴

Kondisi ini mendorong keinginan memperbaiki sistem hukum pidana nasional karena keterbatasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini membutuhkan solusi yang baik dan efektif agar kondisi sosial masyarakat menjadi lebih baik. Menurut Soerjono Soekanto pemecahan masalah sosial berbeda dengan problema-problema lainnya dalam masyarakat karena masalah tersebut berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.⁵

Upaya pembaharuan hukum pidana nasional untuk mengatasi masalah sosial dewasa ini terus

¹ Sikap kritis masyarakat disampaikan dalam bentuk kritik terhadap peraturan perundang-undangan dari segi substansial yang menuntut pemerintah melakukan perubahan/perbaikan agar kaidah hukum tersebut dapat memberikan keadilan dan mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat. Disamping kritik terhadap substansi hukum sikap ini ditujukan kepada penegakan hukumnya (aplikasi norma). Penegak hukum dipandang tajam ke bawah tumpul ke atas, tidak imparsial dan tidak berpihak pada kepentingan pencari keadilan (*justicia bellen*).

² Sajipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 113.

³ Cecep Wiharma, 2017, *Penegakan Hukum Legalistik dalam Perspektif Sosiologis*, Jurnal Mimbar Hukum Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 3, No. 2 Desember, hlm. 220.

⁴ Sajipto Rahardjo, 1990, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 99.

⁵ Soerjono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 335.

disuarakan oleh berbagai kalangan melalui re-formulasi kebijakan hukum pidana yang bersumber pada KUHP karena pangkal hukum pidana adalah KUHP⁶ sebagai warisan Kolonial Belanda yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Keadaan KUHP warisan Kolonial Belanda dibuktikan dalam Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offender*” yang menyatakan sistem hukum pidana yang ada di beberapa negara pada umumnya bersifat “*absolute and unjust*” (telah usang dan tidak adil) serta “*outmoded and unreal*” (ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan).⁷ Argumentasinya karena sistem hukum pidana yang berasal dari hukum asing sezaman kolonial tidak berakar pada nilai-nilai budaya bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif

terhadap kebutuhan sosial masyarakat masa kini. Kondisi ini dalam kongres PBB dipandang sebagai faktor yang memberikan kontribusi untuk terjadinya kejahatan (*a contributing factor to the increase of crime*).⁸

Peranan hukum pidana dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial seringkali mengundang perdebatan. Sebagai contoh masalah delik perzinahan (delik kesusilaan) yang diatur dalam Pasal 284 KUHP saat ini tidak mampu menjawab kemajuan zaman karena adanya keterbatasan rumusan norma yang tidak mampu mengakomodir kasus-kasus yang saat ini terjadi berupa hubungan seksual yang dilakukan di luar perkawinan yang sah oleh para remaja generasi masa kini yang belum terikat perkawinan. Kondisi ini terjadi karena KUHP hanya mencancam sanksi pidana bagi pelaku perzinahan yang telah terikat perkawinan saja sedangkan bagi pelaku perzinahan yang tidak terikat perkawinan tidak dikenakan sanksi padahal perbuatan zina bertentangan

⁶ Mia Amalia, 2016, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua, Kampung Arab*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 2, No. 2, Desember, hlm. 866.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45.

⁸ Dian Andriasari, 2012, *Transformasi Nilai-nilai Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia* dalam Hukum Untuk Manusia, Pilar Utama Mandiri, Jakarta, hlm. 70.

dengan nilai-nilai budaya dan nilai etis bangsa Indonesia. Akibatnya pergaulan bebas atau hubungan seksual seolah menjadi sesuatu yang biasa.⁹

Kondisi ini merupakan sebagian kecil dari wajah hukum pidana nasional yang ada dalam KUHP warisan Kolonial Belanda. Secara ideologi bangsa Indonesia jelas jauh berbeda dengan negeri Belanda sehingga produk hukum pidana negeri Belanda jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai kultur bangsa Indonesia. Sebagai negara berideologi Pancasila Indonesia menganut falsafah Ketuhanan YME yang disandarkan pada agama pemeluknya di mana legalisasi hubungan seksual dalam negara beragama hanya melalui lembaga perkawinan.¹⁰

Kemauan melaksanakan pembaharuan terhadap hukum pidana nasional (KUHP) perlu dilakukan dengan mengeluarkan substansi KUHP saat ini yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang dianut bangsa Indonesia

dengan melakukan re-evaluasi dan reformulasi norma yang dirasa tidak mencerminkan keinginan/kebutuhan masyarakat.¹¹

Berangkat dari perubahan sosial dan keinginan untuk melakukan upaya pembaharuan terhadap KUHP saat ini menjadi modal menuju proses rekonstruksi dan reformasi hukum pidana nasional yang lebih mencerminkan jati diri bangsa dengan mengakomodir ide/paradigma/nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Reformasi hukum pidana nasional melalui penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sejatinya memiliki tujuan atau misi agar pembangunan sistem hukum nasional dapat dilaksanakan secara terukur dan terarah sesuai dengan misi yang telah digariskan. Meski demikian memerlukan suatu kajian mendalam untuk merumuskan kaidah hukum yang sesuai dengan misi yang ingin dicapai agar tidak terjadi inkonsistensi antara misi dengan kaidah hukum konkret yang terlanjur dipositifkan terutama terkait masalah kebijakan pidana yang

⁹ Mujahidin, 2005, *Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dan Asas Keadilan*, Jurnal Varia Peradilan, Vol. 5, No. 1, Desember, hlm. 147.

¹⁰ Setandyo Wigjosoebroto, 1994, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 18.

harus memperhatikan hakikat permasalahan.¹²

Cita-cita untuk mentransformasikan ide/nilai budaya bangsa Indonesia dalam proses pembaharuan hukum pidana adalah sebuah cita-cita luhur walaupun untuk mencapai cita-cita tersebut tidaklah mudah dan menurut sebagian pihak adalah kemustahilan namun demikian dinamika proses mengubah hukum ke arah yang lebih baik merupakan suatu keniscayaan yang harus dihadapi dan dijawab. Dalam penelitian ini terdapat identifikasi masalah sebagai berikut: 1. Apakah misi yang menjiwai pembaharuan hukum pidana nasional dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?; 2. Bagaimana transformasi ide/paradigma/nilai Pancasila dalam Rancangan KUHP baru untuk mereformasi hukum pidana nasional?.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*yuridis normatif*) karena akan mengkaji

berbagai norma, asas dan filosofi Pancasila yang menjadi acuan dalam proses pembaharuan hukum pidana nasional secara menyeluruh. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena akan menggambarkan suatu kenyataan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan transformasi nilai-nilai Pancasila kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikemukakan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yakni menganalisis sumber bacaan yang bersifat teoritis ilmiah seperti buku-buku, jurnal ilmiah, makalah yang telah diseminarkan sehingga dapat dijadikan dasar penelitian dalam menganalisis persoalan yang dikemukakan.

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, karena tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif ialah

¹² Ade Mahmud, 2017, *Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 3, No. 2, Desember, hlm. 147.

suatu cara berfikir yang berawal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Makna/Misi yang Menjiwai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Dalam Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah Kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional.¹³ Usaha tersebut telah dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan

pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.¹⁴

Pertimbangan perlunya melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia didasarkan pada beberapa alasan-alasan sebagai berikut:¹⁵

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipandang tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional;
2. Perkembangan hukum pidana di luar KUHP baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP, keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional
3. Dalam beberapa hal telah terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma

¹³ Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa upaya pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk kajian *penal policy* yang menjadi bagian terkait dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Yang dimaksud *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada hakikatnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

¹⁴ Wisnubroto, 2006, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 34.

¹⁵ Mokhammad Najib, 2014, *Politik Hukum Pidana, Konsepsi Pembaharuan dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Jakarta, 2014, hlm. 12.

hukum pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP.

Pembaharuan hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai nilai sentral sosio politik bangsa Indonesia,¹⁶ melalui penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada perkembangannya memiliki beberapa misi yang berusaha merespon kebutuhan sosial masyarakat Indonesia sekaligus mencerminkan nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa yaitu:¹⁷

1. Dekolonisasi Hukum Pidana

Misi melakukan “dekolonisasi” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi” semula adalah misi tunggal untuk mengganti ide KUHP lama yang berjiwa individualistik dari pemerintah Kolonial Belanda menjadi KUHP berjiwa keindonesiaan yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa yang dianggap sudah final. Misi dekolonisasi adalah tujuan

mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam penyusunan dan pembaharuan hukum pidana nasional.

Para perumus melakukan kodifikasi total terhadap seluruh aturan-aturan pidana yang ada di KUHP saat ini dengan aturan-aturan pidana yang berada di luar KUHP. Semangat rekodifikasi ini didasarkan pada misi dekolonisasi dan harmonisasi hukum pidana sehingga segala bentuk aturan hukum pidana akan disatukan dalam satu buku khusus. Menggunakan model kodifikasi dalam Rancangan KUHP tentu akan memberikan pengaruh bagi:¹⁸

- Undang-Undang sektoral yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP;
- Pemetaan ulang terhadap tindak pidana administratif;
- Aturan pidana dalam peraturan daerah;
- Hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum pidana adat);
- Sejumlah instrumen hukum internasional yang mungkin

¹⁶ Rusman, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Profesional Berpihak Pada Fakta Hukum dan Keadilan*, Jurnal Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 3, No. 2, Desember, hlm. 240.

¹⁷ Lihat Penjelasan Umum Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015

¹⁸ Saiful Bakhri, 2015, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana*, Makalah Seminar Pembaharuan KUHP Indonesia, Mahupiki, Bandung, hlm. 23.

berlaku pasca terbentuknya KUHP baru.

Persoalannya peraturan pidana di luar KUHP saat ini memiliki peranan sentral dalam perkembangan hukum pidana Indonesia namun model kodifikasi total yang dianut dalam Rancangan KUHP mengharuskan semua ketentuan pidana di luar KUHP dimasukkan dalam Rancangan KUHP sehingga memerlukan kajian mendalam untuk menghindari potensi timbulnya dualisme (*ambiguity*), ketidakjelasan serta konflik antar Rancangan KUHP dengan instrumen hukum yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP.

2. Misi Demokratisasi Hukum Pidana

Demokratisasi hukum pidana ditandai dengan masuknya tindak pidana terhadap Hak Asasi Manusia dan hapusnya tindak pidana penaburan permusuhan atau kebencian (*hatzaai-artikelen*) yang merupakan tindak pidana formil dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana penghinaan yang merupakan tindak pidana materiil.¹⁹

¹⁹ Tindak pidana formil (*formele delicten*) dalam khazanah hukum pidana merupakan delik yang tidak mensyaratkan adanya akibat yang terjadi dalam artian cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur delik yang

Landasan masuknya tindak pidana HAM dalam Rancangan KUHP bersumber dari falsafah negara hukum bahwa Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3)) UUD 1945 wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selama ini tindak pidana terhadap HAM diatur tersendiri di luar KUHP yaitu Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM yang memberikan ancaman pidana terhadap dua bentuk kejahatan HAM yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁰ Dilihat dari segi pengaturannya tindak pidana HAM dalam Rancangan KUHP (Bab IX) ditujukan untuk melindungi kepentingan umum yang hidup di alam demokrasi.

3. Misi Konsolidasi Hukum Pidana

Sejak Indonesia lepas dari penjajahan Belanda pada tanggal 17

diatur dalam Undang-Undang maka pelaku (*dadder*) sudah bisa dikenakan pidana. Sedangkan tindak pidana materiil (*material delicten*) adalah jenis delik yang mensyaratkan adanya akibat yang harus ditimbulkan/terjadi sebagai dampak diwujudkannya perbuatan pidana oleh pelaku, tanpa adanya akibat berarti belum memenuhi rumusan delik dan pelaku tidak bisa dikenakan sanksi pidana.

²⁰ Bambang Santoso, 2016, *Penegakan Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum dan Keadilan*, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Vol. 3, No. 2, Juni, hlm. 173.

Agustus 1945 perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berbagai kekhasannya sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka asas-asas hukum pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penguatan peraturan hukum pidana yang berlaku sejak Indonesia merdeka sampai saat ini memerlukan penguatan untuk menyatukan ketentuan-ketentuan pidana ke dalam satu peraturan hukum pidana yaitu Rancangan KUHP baru agar hukum pidana nasional yang tersebar di luar KUHP dapat disatukan, dikuatkan dan diberlakukan secara bersamaan. Misi konsolidasi hukum merupakan kelanjutan dari misi dekolonisasi berupa kodifikasi karena jika perumus melakukan kodifikasi hukum pidana tanpa melakukan konsolidasi akan menimbulkan dualisme dan kekacauan hukum pidana materiil.

Untuk mencapai misi konsolidasi hukum pidana perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati perumus harus menginventarisasi berbagai peraturan hukum pidana sejak era kemerdekaan

sampai reformasi termasuk hukum pidana adat dan peraturan daerah yang memuat sanksi pidana. Misi konsolidasi akan menghasilkan penyatuan (unifikasi) substansi hukum yang beraneka ragam untuk menghindari norma yang saling bertentangan (*antinomy normen*) satu dengan lainnya.

4. Misi Adaptasi dan Harmonisasi

Konsep/Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu melakukan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional sebab kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menserasikan dan harmonisasi hukum dengan perkembangan sosial masyarakat.²¹

²¹ Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana terkait erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Hal ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga terkait erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan

Secara keseluruhan perbedaan mendasar antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru adalah filosofi yang mendasarinya. KUHP warisan Belanda secara keseluruhan dilandasi oleh pemikiran aliran klasik (*classical school*) yang berkembang pada abad ke 18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana (*Daad-Strafrecht*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru mendasarkan diri pada pemikiran Neo-Klasik (*Neo Classica School*) yang menjaga keseimbangan antara faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subyektif (orang/batiniah/sikap batin). Aliran ini berkembang pada abad ke 19 yang memusatkan perhatiannya tidak hanya kepada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi tetapi juga terhadap aspek-aspek individual si pelaku tindak pidana (*Daad-Dader-Strafrecht*).

Pemikiran mendasar lain yang mempengaruhi penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perkembangan ilmu pengetahuan

tentang korban kejahatan (*victimology*) yang berkembang setelah perang Dunia II menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbedaan falsafah dan perkembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi perumusan 3 (tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana yaitu (1) perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, (2) pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan (3) sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berdasarkan asas-asas hukum pidana yang mendasarinya.²²

Karakter *Daad-Dader-Strafrecht* dipandang lebih manusiawi dan sejalan dengan falsafah Pancasila yang menganut filsafat kemanusiaan yang adil dan beradab serta secara sistemik mewarnai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang antara lain tersurat juga tersirat dari adanya berbagai peraturan yang berusaha menjaga keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan unsur/faktor subyektif (manusia/batiniah/sikap batin).

pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangi itu

²² Lihat Penjelasan Umum Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015

Berbagai misi tersebut dilatakan dalam kerangka politik hukum yang tetap memandang perlu penyusunan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketetapan dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menelusuri sejarah hukum pidana di Indonesia dapat diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh Indie* (Staatsblaaf 1915). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 *Wetboek van Strafrecht* tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.²³

²³ Andi Sofandi, 2015, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional*, Makalah Seminar Nasional Pidana Mati, Hotel Horison, Bandung, hlm. 15.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh Indie disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinyatakan berlaku untuk penduduk Pulau Jawa dan Madura sedangkan untuk daerah-daerah lain akan ditetapkan oleh Presiden walaupun pada perkembangannya saat ini KUHP diterapkan untuk seluruh penduduk Indonesia. Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh Indonesia saat ini secara *de facto* belum terwujud karena para penyusun masih mengidentifikasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang bisa dirumuskan dalam Konsep KUHP baru secara menyeluruh.

Harus dikau bahwa di era kemerdekaan telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Kolonial Belanda dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya baik nasional maupun internasional. Dalam hal ini disamping berbagai perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No 73 Tahun 1958. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

telah beberapa kali mengalami pembaharuan dan/atau perubahan.²⁴ Berbagai pemabaharuan dan/atau perubahan yang terjadi tersebut pada dasarnya bersifat ad-hoc dan bernuansa evolusioner serta tidak dapat memenuhi 4 (empat) misi perubahan mendasar yang telah diuraikan di atas (dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi dan harmonisasi) sehingga penyusunan Kitan Undang-Undang Hukum Pidana baru harus dilakukan.

B. Transformasi Ide/Paradigma/Nilai Pancasila Dalam Rancangan KUHP Untuk Mereformasi Sistem Hukum Pidana Nasional

Transformasi berasal dari bahasa Inggris “*transformation*” yang berarti perubahan bentuk, mengubah, perubahan, penjelmaan. Sedangkan nilai-nilai budaya yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Makna transformasi nilai-nilai Pancasila mengandung arti bahwa adanya proses mentransfer, mengalihkan ide dasar//paradigma/nilai Pancasila ke dalam Rancangan KUHP

baru dengan memilih dan memilah bagian mana saja yang dimungkinkan untuk dirumuskan dalam Rancangan KUHP baru secara terukur, terarah, rasional dan bijaksana.²⁵

Penyusunan Rancangan KUHP baru dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan pembangunan hukum nasional untuk melakukan pembaharuan sekaligus perubahan KUHP lama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh Indie*. Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada dasarnya merupakan bagian dari ide yang lebih besar yaitu pembangunan sistem hukum nasional yang

²⁴ Roni Nitibaskara, 2014, *Makna Pembaharuan Hukum Pidana*, Makalah Seminar Hukum Pidana Nasional, Universitas Padjajaran, hlm. 2.

²⁵ Usaha transformasi nilai-nilai Pancasila adalah usaha untuk menerapkan peraturan hukum pidana yang mencerminkan ideologi politik bangsa Indonesia. Dapat diperhitungkan bahwa KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat individualistis-kapitalis itu bercorak lain daripada KUHP dari negara-negara Eropa Timur yang berlandaskan pada politik sosialis. Di negara Indonesia berpandangan politik Pancasila sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan umum tentang hukum, negara, masyarakat dan kriminalitas. Dengan demikian sudah waktunya untuk merombak tata hukum pidana yang berpijak pada asas-asas dan dasar yang berasal dari zaman Kolonial dan menggantinya dengan tata hukum pidana Indonesia yang asas-asas dan dasar pokoknya berlandaskan Pancasila.

memerlukan *political will* penguasa negeri.²⁶

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*”, “*criminal policy*”, dan “*social policy*” artinya pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya adalah:²⁷

1. Merupakan bagian dan kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
2. Bagian dari kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
3. Bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial untuk mencapai tujuan nasional (*social defance* dan *social welfare*)
4. Upaya peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan re-evaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide dasar, nilai-nilai sosiologis, sosio politik dan sosio kultural yang menjadi melandasi kebijakan kriminal.

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

²⁷ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 161.

Melakukan kebijakan kriminal atau politik kriminal berarti mengadakan pemilihan untuk membentuk peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan kebenaran.²⁸ Artinya pemilihan tersebut didahului dengan inventarisasi nilai-nilai yang akan direduksi atau ditransformasi ke dalam Rancangan KUHP baru agar mencerminkan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*) sehingga dapat terangkai menjadi sistem hukum yang baik. Orientasi tata nilai yang dibutuhkan dalam menyusun Rancangan KUHP baru saat ini adalah nilai-nilai budaya yang bersumber dari Pancasila.²⁹

²⁸ Djisman Samosir, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Putra Baidin, Jakarta, hlm. 43.

²⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat dan dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.

Berangkat dari pemikiran di atas maka penyusunan Rancangan KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari ide atau kebijakan pembangunan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan bangsa yang dicita-citakan. Ini berarti upaya pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya melakukan transformasi ide-ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang terkandung di dalamnya keseimbangan nilai/paradigma yaitu:³⁰

1. Nilai Ketuhanan (moral religius);
2. Nilai Kemanusiaan;
3. Nilai Persatuan (kebangsaan);
4. Nilai Kerakyatan (Demokrasi);
5. Nilai Keadilan Sosial;

Simposium Pembaharuan hukum pidana tahun 1980 mengungkapkan bahwa pembaharuan hukum pidana dan sistem peradilan pidana seyogyanya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis yang berpangkal pada nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat, nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila. Mentransformasikan nilai-

nilai budaya Pancasila yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia merupakan langkah bijaksana untuk mempersiapkan bangunan hukum pidana nasional yang merespon tuntutan perubahan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Rancangan KUHP baru bahwa:

(1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2). Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Hukum yang hidup dalam ketentuan di atas adalah hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia. Bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat hukum Indonesia antara lain dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum tidak tertulis yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang biasa disebut hukum pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai

³⁰ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 28.

berlakunya hukum pidana adat maka hal tersebut mendapatkan pengaturan secara tegas dalam Rancangan KUHP baru.³¹

Pembangunan sistem hukum nasional seyogyanya dilandaskan pada konsep tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat tidak terkecuali membangun sistem hukum pidana juga patut mempertimbangkan paradigma nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila.

Patut diperhatikan bahwa ilmu membuat hukum bukan sekedar ilmu merumuskan/memformulasikan norma, tetapi pada hakikatnya ilmu tentang menggali atau merancang dan mengimplementasikan ide-ide dasar/konsep/gagasan dan nilai Pancasila ke dalam formulasi hukum. Sungguh suatu rintihan yang memperhatikan apabila pada tahun 1964 penyusun Konsep pertama KUHP baru menyatakan bahwa dengan

diberlakukannya KUHP (WvS) Hindia-Belanda berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1946 maka pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana Kolonial Belanda masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia dan rintihan itu masih dirasakan sampai saat ini. Oleh karena itu, sepatutnya mendapat respon dari lembaga pendidikan tinggi hukum dan badan legislatif untuk melakukan transformasi nilai-nilai budaya Pancasila ke dalam Rancangan KUHP baru agar hukum pidana nasional di masa mendatang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Usaha untuk memperbaiki keadaan hukum pidana nasional dapat diartikan sebagai suatu ikhtiar untuk mengubah suatu kondisi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik karena keadaan suatu masyarakat tidak akan berubah sampai mereka mau mengubah dirinya sendiri. Hal ini dijelaskan dalam (QS Radu : 11) bahwa:³²

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali jika mereka mengubah keadaan

³¹ Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain aturan ini akan mencoba memperluas asas legalitas yang mengharuskan adanya ketentuan/aturan hukum pidana lebih dulu sebelum terjadinya perbuatan/ Diakukanya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu.

³² Yusuf Al-Qardhawi, 2000, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam* diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Pustaka Alkautsar, Jakarta, hlm. 2.

diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS Ar-Ra’d : 11)

Pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana mentransformasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana telah disebutkan di atas (nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan, Demokrasi dan Keadilan Sosial) ke dalam Rancangan KUHP baru. Pertanyaan ini perlu dianalisis menggunakan teori kebijakan hukum pidana bahwa kebijakan pembaharuan hukum pidana sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Operasionalisasi Kebijakan hukum pidana meliputi dua aspek:³³

1. Kebijakan penal
 - a. Kebijakan Formulasi (*Legal Substance*);
 - b. Kebijakan Aplikasi (*Legal Structure*);
 - c. Kebijakan Eksekusi (*Legal Culture*);
2. Kebijakan non penal

Berdasarkan teori kebijakan kriminal nilai-nilai Pancasila memungkinkan ditransformasi ke dalam Rancangan KUHP dengan mengoperasionalkan/menerapkan kebijakan formulasi untuk merumuskan norma-norma yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui strategi *penal reform*, yaitu:

1. Mengidentifikasi masalah dengan mengkaji norma lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat (*problem identification of norm*);
2. Melakukan evaluasi nilai/ide dasar yang melatarbelakangi rumusan pasal dengan membandingkan kecocokan antara ide lama (individualisme-liberalisme) dan ide baru dengan karakteristik budaya masyarakat (nilai-nilai Pancasila);
3. Melakukan formulasi yaitu mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam rumusan pasal baru dan mencabut rumusan ide/nilai yang terdapat dalam pasal lama.

³³ Edi Setiadi, 2005, *Prospek Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Syiar Madani Ilmu Hukum Vol. 7, No. 2, Juli, hlm. 162.

Tabel 1
Transformasi Nilai Pancasila Dalam Rancangan KUHP

Strategi Penal Reform	Obyek	Ide/Paradigma/Nilai
Identifikasi Masalah	Rumusan Pasal Lama	KUHP-Individualism Daad-Strafrecht
Evaluasi Ide/Nilai	Ide Lama dan Ide Baru	Ide lama: 1. Individualism, 2. liberalism Ide Baru: 1. Ketuhanan 2. Kemanusiaan 3. Persatuan 4. Kerakyatan 5. Keadilan Sosial
Transformasi (Formulasi)	Rumusan Pasal Baru	RKUHP-Pancasila Daad-Dadder-Strafrecht

Transformasi sebagaimana ditampilkan pada bagan di atas adalah alur sederhana yang berusaha memberikan gambaran langkah transformasi ide/paradigma/nilai lama dengan ide/paradigma/nilai baru (Pancasila) ke dalam Rancangan KUHP baru sesuai jati diri bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang menjiwai KUHP saat ini dipandang banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Transformasi nilai Pancasila dalam Rancangan KUHP baru hanya bisa dilaksanakan dengan

mengoperasionalkan kebijakan formulasi yang merespon dan mereduksi kebutuhan sosial dalam sistem hukum pidana nasional.

Kebijakan formulasi norma hukum pidana merupakan skema merumuskan realitas sosial ke dalam teks perundang-undangan secara rasional dan terukur yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang mendorong kebutuhan akan perumusan atau merekonstruksi norma dalam peraturan tertentu. Setiap kali kita membuat rumusan norma tertulis maka pada saat itu kita melakukan

transformasi suatu gagasan yang utuh ke dalam kaidah/norma dalam bentuk kalimat.³⁴ Tidak mudah memindahkan realitas secara sempurna ke dalam teks karena menerjemahkan kenyataan dalam teks memerlukan keahlian *legal drafting* secara teliti dan hati-hati.

Strategi penal reform untuk mereformasi materi hukum pidana nasional sebagaimana bagan di atas akan menghasilkan keseimbangan antara kepentingan umum/negara dengan kepentingan individu, antara kepentingan pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara keadilan dengan kepastian hukum dan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal.

Nilai Pancasila yang ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan (Rancangan KUHP baru) pada ujungnya akan disajikan/diberlakukan kembali untuk masyarakat menjadi pedoman atau rambu-rambu dalam pergaulan sosial yang kelahirannya sangat ditunggu-tunggu agar terwujudnya tata nilai Pancasila dalam masyarakat.

³⁴ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 45.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembaharuan hukum pidana nasional melalui penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlandaskan pada misi (1) Dekolonisasi melalui “rekodifikasi” yang dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (2) Demokratisasi hukum pidana bertujuan untuk melindungi HAM dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) (3) Konsolidasi hukum pidana yang menghasilkan unifikasi hukum dan untuk menghindari benturan norma (*antinomy normen*) (4) Adaptasi dan harmonisasi hukum pidana dengan berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar norma yang diakui bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.
2. Transformasi ide/paradigma/nilai Pancasila dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk mereformasi sistem hukum

pidana nasional memerlukan operasionalisasi kebijakan formulasi hukum pidana melalui strategi penal reform yang mensyaratkan beberapa tahapan yaitu:

- a. Identifikasi problem berupa pengkajian norma lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat
- b. Melakukan re-evaluasi ide dasar/nilai yang ada di belakang pasal lama (ide/paradigma individualisme/liberalisme) dan mengubah/menggantinya dengan menerapkan ide/paradigma/nilai Pancasila dalam rancangan rumusan pasal yang baru (ide/paradigma/nilai ketuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial).
- c. Melakukan formulasi dan mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam rumusan pasal baru dan

mencabut rumusan ide/paradigma nilai yang terdapat dalam pasal lama.

B. Saran

1. Usaha melaksanakan penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional baru untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah Kolonial Belanda merupakan upaya strategis rasional dan terukur. Oleh karena itu disarankan untuk merespon kebutuhan hukum pidana nasional dalam konteks kekinian penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diarahkan pada misi dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi dan harmonisasi hukum pidana.
2. Transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sebuah keniscayaan yang memerlukan dukungan kuat dari pemerintah (*political will*) sehingga materi hukum pidana nasional yang berlaku saat ini sebaiknya disesuaikan dengan politik hukum, keadaan,

perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menggunakan strategi kebijakan formulasi hukum pidana melalui strategi penal reform.

DAFTAR ISI

A. Buku

Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Gentha Publishing, Yogyakarta.

_____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Dian Andriasari, 2012, *Transformasi Nilai-nilai Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia* dalam Hukum Untuk Manusia, Pilar Utama Mandiri, Jakarta.

Djisman Samosir, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Putra Baidin, Jakarta.

Mokhammad Najib, 2014, *Politik Hukum Pidana, Konsepsi Pembaharuan dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Jakarta.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat dan dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sajipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

_____, 1990, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

Setandyo Wigjosebroto, 1994, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Wisnubroto, 2006, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Yusuf Al-Qardhawi, 2000, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam* diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Pustaka Alkautsar, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

C. Jurnal, Makalah, Internet dan Lain-lain.

Ade Mahmud, 2017, *Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 3, No. 2, Desember.

Andi Sofandi, 2015, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional*, Makalah Seminar Nasional Pidana Mati, Hotel Horison, Bandung.

Edi Setiadi, 2005, *Prospek Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Syiar Madani Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, Juli.

Bambang Santoso, *Penegakan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Universitas Pamulang,

Tangerang Selatan, Vol. 3, No. 2, Juni.

Cecep Wiharma, *Penegakan Hukum Legalistik dalam Perspektif Sosiologis*, Jurnal Mimbar Hukum Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol 3 No 2 Desember 2017.

Mia Amalia, 2016, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua, Kampung Arab*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 2, No. 2, Desember .

Mujahidin, 2005, *Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dan Asas Keadilan*, Jurnal Varia Peradilan, Vol. 5, No. 1, Desember.

Roni Nitibaskara, 2014, *Makna Pembaharuan Hukum Pidana*, Makalah Seminar Hukum Pidana Nasional, Universitas Padjajaran.

Rusman, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Profesional Berpihak Pada Fakta Hukum dan Keadilan*, Jurnal Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 3, No. 2, Desember.

Saiful Bakhri, 2015, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana*, Makalah Seminar Pembaharuan KUHP Indonesia, Mahupiki, Bandung.